

Manajemen Pemerintah Dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Oleh:

¹ Fitri Yanuar; ² Cucu Sugiarti; ³ Haura Atthahara.

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang

email. 1610631180078@student.unsika.ac.id

Abstrak

Pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan ditandai adanya interaksi jual-beli masalah umum yang sering ditemukan di pasar tradisional adalah penumpukan sampa, bau sampah disekitar pasar, dan pengelolaan sampah oleh pengelola pasar yang dinilai masih belum optimal. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui manajemen penanganan dan pengelolaan sampah di Pasar Induk Cibitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Hasil dari penelitian manajemen penanganan dan pengelolaan sampah di Pasar Induk ini masih menggunakan metode yang konvensional yaitu kumpul – angkut – buang. Pihak pengelola pasar belum memiliki inovasi serta progres kerja dalam mengelola sampah pasar. Walaupun dengan metode konvensional yang meliputi, kumpul – angkut – buang, kondisi di lapangan, sampah masih sering menumpuk dan tercecer di area pasar serta menimbulkan bau yang menyengat. Hal temuan lain di lapangan adalah keberadaan TPS hanya ada satu, yang muatannya tidak sebanding dengan volume produksi sampah yang berakibat pada penumpukan sampah karena sudah melebihi batas muatan tampung serta bau sampah yang sangat menyengat. Sedangkan hal yang perlu ditingkatkan adalah melakukan penambahan waktu untuk pengangkutan sampah, agar sampah tidak terlalu menumpuk.

Kata Kunci: Manajemen; Penanganan; Pengelolaan; Sampah.

Abstract

The market is a meeting place for sellers and buyers, marked by the interaction of buying and selling. Common problems that are often found in traditional markets are the accumulation of garbage, the smell of garbage around the market, and waste management by market managers who are considered not optimal. The purpose of this study was to determine the management of handling and management of waste in Cibitung Main Market. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, documentation, and triangulation. The results of this research on waste management and management in the Central Market still use conventional methods, namely collect - transport - throw away. The market manager does not yet have innovation and work progress in managing market waste. Even with the conventional method which includes collect - transport - throw away, conditions in the field, garbage often piles up and is scattered in the market area and causes a strong odor. Another finding in the field is that there is only one TPS, whose load is not proportional to the volume of waste production which results in the accumulation of garbage because it has exceeded the capacity limit and the smell of garbage is very strong. While the thing that needs to be improved is to increase time for transporting waste, so that the garbage does not accumulate too much.

Keywords: Management; Handling; Management; Rubbish.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah titik fokus paling penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerahnya adalah dengan cara membangun fasilitas umum. Salah satu diantaranya yaitu pasar. Pasar adalah salah satu tempat sarana dan penggerak ekonomi masyarakat suatu daerah.

Pasar merupakan tempat kegiatan jual beli, juga ditandai dengan adanya kegiatan tawar-menawar secara langsung. Pasar bukan lagi tempat yang asing bagi mereka yang setiap hari memiliki kesibukan dalam berdagang, bagi mereka pasar merupakan rumah kedua setelah tempat tinggal karena pasar akan terus mereka kunjungi untuk berjualan hampir setengah hari. Pasar juga merupakan sarana penggerak perekonomian masyarakat khususnya bagi para pedagang.

Keberadaan pasar tradisional, Hantono, Butudoka, Prakoso, dan Yuliasaksono, (2019) merupakan penopang perekonomian dan keberlangsungan hidup bagi sebagian besar masyarakat di daerah, meskipun dalam aktivitas yang terjadi pasar menyumbang berbagai jenis sampah dalam volume yang cukup besar. Pasar tradisional memiliki stigma yang buruk dalam hal pengelolaan lingkungan, pasar tradisional dikenal dengan tempat yang kotor, kumuh, dan bau yang menyengat menjadi salah satu alasan banyak beralihnya pengunjung pasar tradisional ke pasar modern, Andriani & Ali, (2003).

Bagi sebagian masyarakat pasar masih menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan bagi para pedagang, pasar merupakan tempat yang tepat untuk menjadi roda perekonomian mereka. Begitu juga dengan Pasar Induk, sebagaimana namanya yang diikuti dengan kata “induk”, Pasar Induk merupakan pasar pusat atau pasar besar yang memiliki keberagaman produk yang lebih lengkap serta harga yang lebih terjangkau, dan juga memiliki budaya tawar menawar menunjukkan adanya rasa akrab antara penjual dan pembeli. Begitupun dengan Pasar Induk Cibitung yang merupakan pasar besar atau distributor bahan pokok rumah tangga. Pasar Induk Cibitung didominasi oleh penjual bahan mentah makanan seperti sayur, buah. Kegiatan di Pasar Induk Cibitung terjadi sepanjang hari dimulai dari pagi hingga malam. Maka dari itu kebersihan dan kenyamanan pada Pasar Induk seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.

Keberadaan pusat perdagangan merupakan salah satu indikator paling nyata terlihat pada kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Chintya dan Kartika (2019). Menurut Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan (Handoyono, 2012), pasar harus dapat memenuhi fungsi strategisnya yaitu seperti, memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan nilai sosial dan budaya Indonesia, serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Defitri (2011) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber-sumber PAD salah satunya berasal dari retribusi pelayanan pasar. Pasar memiliki kaitan erat dengan PAD, karena menjadi penunjang perekonomian daerah

sehingga eksistensi pasar tradisional harus mendapatkan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi, disebutkan disana terdapat 5 jenis retribusi yang berlaku di Pasar Induk yaitu, Retribusi Sampah, Retribusi Pasar, Retribusi Pasar untuk Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Pasar Induk untuk semua jenis dagangan, Retribusi tempat parkir, dan Retribusi penggunaan sarana mandi cuci kakus (MCK). Sedangkan khusus untuk retribusi sampah yang wajib dibayarkan oleh para pedagang pasar Induk Cibitung adalah, untuk sampah pasar dikenakan biaya Rp. 3000.- sedangkan untuk sampah kering dikenakan biaya Rp. 2000.- perhari dan perlos/kios.

Namun, ada banyak masalah yang terjadi pada pengelolaan Pasar Induk Cibitung. Masalah utama yang terjadi pada Pasar Induk Cibitung ini adalah masalah sampah. Sampah menumpuk sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang sangat menyengat. Bau sampah tersebut berasal dari banyaknya bahan makanan mentah yang sudah tidak layak dikonsumsi dengan jumlah banyak sehingga terjadi penumpukan. Terlebih ketika musim penghujan, Pasar Induk Cibitung mengalami kenaikan air atau banjir yang memperparah keadaan lingkungan pasar. Ketika musim penghujan tiba Pasar Induk Cibitung menjadi sangat bau karena sampah makanan tidak layak konsumsi menumpuk bercampur dengan air dan lumpur.

Revitalisasi yang dipahami sebagai perbaikan menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan atas kesemrawutan yang diciptakan sampah - sampah pada pasar Induk Cibitung. Revitalisasi yaitu upaya untuk kembali menghidupkan salah satu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup, kemudian mengalami kemunduran Juliarta, (2015). Seperti pada program Presiden RI yakni salah satunya revitalisasi 5000 pasar tradisional yang merupakan bagian dari Nawacita. Kegiatan revitalisasi tersebut adalah memperbaiki pasar lama yang mengalami kerusakan, hingga melakukan pembangunan atau perbaikan kembali pasar yang pernah mengalami musibah seperti kebakaran atau banjir. Namun, lain dengan Pasar Induk Cibitung, pemerintah Kabupaten Bekasi merencanakan revitalisasi pasar sejak empat tahun lalu, yang rencananya adalah pelelangan revitalisasi pasar kepada pihak swasta untuk memperbaharui Pasar Induk Cibitung, proses pelelangan ini terus berjalan sampai pemenang lelang yang sesuai benar-benar ditemukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dicky dan Agi, (2020) memperoleh hasil, bahwa proses pembangunan dan revitalisasi yang dilakukan terkadang hanya terfokus kepada aspek fisik tanpa memikirkan sistem pengelolaan lingkungan khususnya pada masalah sistem pengelolaan sampah yang melibatkan perilaku dan aktivitas dari pengguna pasar. Selain memperbaiki kondisi fisik pasar, manajemen pengelolaan yang baik, SDM pengelola yang berkualitas, meningkatkan jumlah pengunjung atau konsumen.

Revitalisasi juga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan juga penanganan sampah pasar, serta dapat membantu menaikkan daya saing antara pasar induk dengan pasar yang lebih modern. Terlebih pada pasar Induk Cibitung adalah salah

satu pasar distributor dan juga termasuk salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu perlu penataan dan perbaikan secepat mungkin, sehingga pedagang dan juga pembeli merasa nyaman ketika melakukan kegiatan jual beli di Pasar Induk Cibitung. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa, dibutuhkan sebuah manajemen pemerintah yang baik. Untuk itu penelitian ini dilakukan, guna mengetahui manajemen penanganan dan pengelolaan sampah di Pasar Induk Cibitung.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian Manajemen Pemerintah dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah merupakan metode berupa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Anselm Strauss & Juliet Corbin (Djunaidi Ghony, 2017) menyatakan, penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen pemerintahan oleh Thalizu Ndara (Ndaha 2011) untuk mengukur dan menganalisa fenomena-fenomena yang menjadi kajian peneliti, dengan empat dimensi di dalamnya. Yaitu, perencanaan pemerintahan, pengorganisasian pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, kontrol pemerintahan.

Perencanaan Pemerintahan

Menurut G.R Terry (Hasibuan, 2011) perencanaan dapat diartikan sebagai memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan perencanaan pemerintahan menurut Taliziduhu Ndaha (Ndaha 2011) perencanaan pemerintahan dilakukan guna mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi pada penanganan dan pengelolaan sampah di Pasar Induk Cibitung Kabupaten Bekasi yaitu merencanakan revitalisasi. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah hidup, kemudian mengalami kemunduran, Juliarta (2015). Revitalisasi pasar yang dianggap merupakan salah satu solusi yang tepat bagi perbaikan kondisi Pasar Induk Cibitung termasuk dalam pengelolaan sampah agar sampah dapat ditangani dan dapat dikelola dengan baik. Proses perencanaan revitalisasi masih terus berjalan hingga saat ini. Rencana revitalisasi sudah mulai dicanangkan sejak tahun 2016 yang lalu dengan melakukan pelelangan kepada pihak investor swasta.

Bentuk revitalisasi pasar yang direncanakan adalah BOT (*build operate transfer*) atau yang dikenal dengan BGS (bangun, guna, serah) merupakan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Pelaksanaan BGS harus dilaksanakan dengan pertimbangan; (1) Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan (2) Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut. Sedangkan pihak yang dapat melakukan BSG adalah pengelola barang. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Dan pihak yang dapat menjadi mitra BGS meliputi; (1) Badan Usaha Milik Negara, (2) Badan Usaha Milik Daerah, (3) Swasta kecuali perorangan; dan/atau (4) Badan hukum lainnya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa rencana revitalisasi sudah dicanangkan sejak tahun 2016 yang lalu belum terealisasi dan masih berproses sampai saat ini karena masih belum menemukan pemenang lelang yang berhasil memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Bahkan sudah banyak pedagang pasar induk yang sudah mendengar rencana revitalisasi ini. Proses pelelangan revitalisasi pasar dilakukan secara terbuka melalui website yang dapat diakses secara bebas, melalui situs resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Namun berdasarkan temuan peneliti di situs web Layanan Pengadaan Secara Elektronik (lpse.bekasikab.go.id) pelelangan untuk Pasar Induk Cibitung tidak tercantum.

Dalam kasus ini peneliti melihat bahwa ada kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yaitu dari LPSE dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kesalahannya adalah tidak *update* nya data LPSE atau rencana revitalisasi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2016 yang lalu belum ada progresnya sama sekali atau masih dalam tahap kajian oleh SKPD terkait. Karena rencana revitalisasi ini dalam pelaksanaannya memang dibutuhkan proses kajian yang lebih matang dari awal sampai akhir.

Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan

G.R Terry dalam (Hasibuan, 2011) pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kemudian menurut Ndraha (2011). Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

a. Pembagian Tugas

Pengelolaan pasar Induk Cibitung dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi yang merupakan SKPD terkait dalam pengelolaan pasar. Sedangkan Pembagian tugas dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan sebagai pimpinan, kemudian Bidang Perpasaran sebagai koordinator, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pelaksana teknis lapangan. Dalam pengelolaan pasar, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi membentuk struktur wewenang formal yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar yang berjumlah 9 UPTD untuk mengelola 12 Pasar tradisional Kabupaten Bekasi.

Dinas Perdagangan melakukan pembagian tugas yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mengelola pasar, dapat disebut pembagian kerja kedalam bentuk Struktur Organisasi Fungsional, yang dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, penataan, sumber daya manusia. Sistem pengawasan pada struktur organisasi fungsional ini seorang staff atau pegawai tidak bertanggung jawab secara langsung kepada atasan tertinggi, melainkan melalui kepala bidang, kepala bagian, atau kepala UPTD.

Sedangkan pembagian tugas khusus untuk penanganan dan pengelolaan sampah yang di pimpin oleh Kepala UPTD Pasar Cibitung sebagai unit pelaksana teknis lapangan, Kepala UPTD Pasar Cibitung membagi dan mengelompokkan tugas kepada pegawainya berdasarkan jumlah alat penunjang kerja yang dimiliki. Dari data yang didapatkan oleh peneliti dari informan melalui wawancara pada narasumber terkait jumlah petugas serta jumlah alat penunjang kerja yang dimiliki oleh pengelola pasar yaitu. Berikut ini merupakan jumlah petugas dan teknisi kebersihan di Pasar Induk Cibitung,

Tabel Jumlah Petugas Kebersihan Pasar Induk Cibitung

NO.	KATEGORI	JUMLAH
1.	THL (Tenaga Harian Lepas)	50
	Pesafon	33
	Sopir Truk	13
	Sopir Loader	2
	Sopir Pick Up	1
	Sopir Baktor	1
Total Personil		50

Sumber: Data Profil Pasar Induk Cibitung

Berdasarkan tabel diatas terkait pembagian tugas yang dilakukan khususnya dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah di Pasar Induk Cibitung, UPTD Pasar Cibitung membagi tim atau regu khusus dalam upaya pekerjaan kebersihan terutama yang terkait dengan pekerjaan dalam penanganan dan pengelolaan sampah di pasar induk cibitung. Pembagian tugas atau pembagian regu dan teknisi kebersihan ditentukan dengan jumlah alat yang dimiliki dengan tujuan agar masing-masing orang yang sudah memiliki tugas dan alat penunjang kerja agar lebih bertanggung jawab

dengan pekerjaan yang telah diberikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh petugas kebersihan ini terdiri dari pengumpulan sampah pasar yang dihasilkan dari kegiatan jual-beli di pasar induk, dengan cara mengumpulkan sampah menggunakan alat berat loader, dan membersihkan area pasar oleh pesafon (penyapu area pasar), pengangkutan oleh mobil pick up, dan mobil baktor. Kemudian sampah dikumpulkan di TPS yang berada di samping pasar. Sampah akan dikumpulkan terlebih dahulu di TPS kemudian sampai waktu pengangkutan ke TPA tiba. Pengangkutan sampah menggunakan 13 drup truk, ke TPA yang berada di Burangkeng, hanya dilakukan satu kali dalam satu hari. Hal ini merupakan salah satu alasan penumpukan sampah di pasar induk dan salah satu alasan terciptanya bau sampah yang menyengat karena pengangkutan sampah dengan volume yang tinggi hanya dilakukan satu kali dalam satu hari.

Namun pada penelitian ini, peneliti melihat jumlah petugas kebersihan yang dimiliki oleh pengelola pasar induk cibitung masih kurang, petugas kebersihan yang dimiliki hanya 33 orang. Melihat beban kerja yang harus dilakukan oleh para pekerja kebersihan yaitu menyapu jalan dan membersihkan area pasar induk cibitung yang sangat luas, mengumpulkan sampah dan membersihkan kios/los pedagang pasar, kemudian membuangnya ke TPS. 33 orang dinilai masih sangat kurang untuk membersihkan pasar sebesar Pasar Induk Cibitung.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk saat ini cara kerja atau metode yang digunakan dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Pasar Induk Cibitung masih menggunakan cara-cara atau metode yang masih konvensional yaitu kumpul – angkut – buang. Hal ini membuat cara kerja pengelola pasar induk cibitung masih sangat umum (*general*), hal ini dinilai kurang tepat jika pasar induk belum memiliki alat yang paling vital yaitu mesin pengolah sampah, karena pasar induk merupakan pasar besar yang memproduksi sampah organik berupa sayur dan buah yang sudah membusuk dengan kandungan air yang tinggi, dan volume yang mencapai puluhan ton dalam satu hari.

Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat maupun dari aktivitas pasar. Sementara itu, rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan bersih dan sehat. Muhlis (2011).

Dengan melihat karakteristik dan komposisinya, sampah organik yang dihasilkan berpotensi memberikan nilai ekonomi, jika diproses dan dikelola dengan baik. Sampah organik yang dihasilkan dapat dijadikan kompos padat maupun cair. Sedangkan cairan yang dihasilkan dari sampah juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair (POC).

Berdasarkan penelitian dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa alat-alat konvensional yang digunakan untuk mengangkut sampah saat ini masih dibilang dalam kategori yang cukup dengan memiliki 2 loader, 13 drump truk, 1 mobil pick up, 1 mobil baktor untuk menunjang kegiatan pengangkutan sampah. Meskipun demikian, dalam waktu-waktu tertentu harus dilakukan peremajaan dan perbaikan peralatan.

Karena menginat bahan utama dari alat-alat penunjang kerja untuk mengangkut sampah adalah besi yang dalam kurun waktu tertentu dapat berkarat dan usang, terlebih sampah yang harus diangkut merupakan sampah basah yang mengandung kadar air yang tinggi serta pengangkutan sampah dilakukan setiap hari.

Namun hal lain yang juga perlu diperhatikan oleh pihak pengelola pasar adalah TPS yang dimiliki hanya satu, dan sering terjadi penumpukan sampah dengan jumlah besar karena daya tampung yang tidak sebanding dengan volume produksi sampah perhari pasar induk cibitung. Penumpukan sampah di TPS menimbulkan bau yang sangat menyengat diarea pasar. Bau sampah yang menyengat diarea pasar dan area sekitar pasar menimbulkan keresahan dan kemarahan masyarakat sekitar pasar induk cibitung. Menurut Wahyu (2018), masalah sampah yang ada di indonesia merupakan masalah yang rumit karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah dan kurangnya anggaran dana pemerintah untuk mengusahakan pembuangan sampah yang baik dan memenuhi syarat. Maka akan menjadi sesuatu yang sangat wajar jika pengelola pasar sering mendapati teguran serta kritikan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan bau sampah yang sangat menyengat. Menurut Tiara (2017), sistem pengelolaan yang baik dan benar akan memberikan keuntungan serta mengurangi pencemaran yang diakibatkan menumpuknya limbah sampah, dengan memberikan upaya alternatif karena timbulan sampah yang terkelola dengan baik.

Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011). Pada dimensi ini, penggunaan sumber-sumber pemerintahan dilakukan dengan tujuan menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapat hasil-hasil yang sudah ditetapkan.

a. Retribusi Pasar

Retribusi Pasar Induk Cibitung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah. Pada peraturan tersebut, disebutkan bahwa, terdapat 5 jenis retribusi yang berlaku di pasar Induk Cibitung. Diantaranya yaitu retribusi sampah pasar induk, retribusi pasar induk, retribusi PKL pasar induk, retribusi tempat parkir, dan retribusi penggunaan MCK. Khusus untuk retribusi sampah Pasar Induk dikenakan tarif Rp. 2000,-/Los/Kios untuk jenis sampah kering dan Rp. 3000,-/Los/Kios untuk jenis sampah basah.

Mekanisme pembayaran retribusi oleh pedagang kepada pengelola pasar dilakukan setiap hari. Alurnya, pedagang membayar retribusi sampah yang disesuaikan dengan jenis sampah dan ukura Los/Kios yang ditempati, kemudian dikumpulkan oleh bendahara pengelola pasar, lalu disetorkan ke Kas Daerah melalui transaksi di Bank secara langsung. Transaksi dilakukan setiap hari. Namun Kepala UPTD Pasar Cibitung mengatakan, selama pandemi beberapa bulan terakhir, berakibat pada menghambatnya penarikan retribusi yang biasanya dapat mencapai target. Target yang ditentukan perhari untuk penarikan retribusi pasar menjapai 7 juta. Target perhari yang telah ditentukan tujuannya agar dapat mencapai target tahunan yang mencapai 2,6 Milyar.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, walaupun retribusi sampah wajib dibayarkan setiap hari oleh para pedagang tetapi pada kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah, sampah masih banyak ditemukan berserakan di area pasar dan juga di setiap Los/Kios para pedagang, juga jalan akses keluar masuk pasar induk cibitung yang dilumuri sampah hasil pembusukan sayur dan buah yang tercampur dengan air lindih sehingga mengharuskan para pedagaang dan pembeli untuk memkai sepatu boot anti air ketika memasuki area pasar. Selain itu, karena banyaknya sampah di pasar induk yang didoninasi sampah organik menimbulkan bau yang menyengat diarea pasar. Hal ini dinilai bahwa pengelola pasar masih belum memerhatikan tingkat kebersihan lingkungan pasar serta kenyamanan proses berbelanja.

b. Koordinasi

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti terkait koordinasi yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar, pihak pengelola pasar melakukan koordinasi dan komunikasi dalam penanganan dan pengelolaan sampah pasar induk cibitung, pihak pengelola pasar berkoordinasi dengan pihak pengelola TPA di Burangkeng. TPA di burangkeng merupakan tempat pembuangan akhir dari sampah-sampah produksi pasar induk cibitung yang merupakan hasil dari produksi kegiatan jual-beli sepanjang hari di pasar induk cibitung. Menurut kedua belah pihak antara pengelola pasar dan pihak pengelola TPA Burangkeng, mengatakan bahwa, koordinasi dan komunikasi antara keduanya dalam penanganan dan pengelolaan sampah pasar induk cibitung berjalan dengan baik tanpa ada kendala.

Kontrol Pemerintah

Menurut, Ndraha (2011) mengemukakan kontrol pemerintahan dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber tersebut.

Pola pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pasar berupa pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan secara langsung berupa pengawasan bersifat mendadak atau biasa dikenal dengan sebutan Sidak atau inspeksi mendadak. Dalam kegiatan sidak yang dilakukan, selain melakukan kontrol pada penataan fisik pasar, harga bahan pokok, dan ketersediaan bahan pokok di pasar induk cibitung, pihak pengelola pasar juga melakukan komunikasi juga edukasi kepada para pedang untuk sama-sama menjaga lingkungan pasar dan memperhatikan kebersihan lingkungan pasar dari sampah yang seringkali menimbulkan bau yang menyengat. Komunikasi yang biasanya dilakukan berupa edukasi terhadap pedagang terkait menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Sedangkan pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah pengelola pasar akan menerima laporan dari UPTD sebagai pengelola pasar di lapangan, laporan tersebut merupakan hasil pengumpulan fakta-fakta di lapangan terkait laporan kinerja, keuangan, kondisi lapangan dan lain-lain setiap bulan kepada SKPD terkait yakni Dinas Perdagangan. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dari UPTD Pasar Cibitung, pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pasar Cibitung sebagai

pengelola pasar Cibitung khususnya terkait penanganan dan pengelolaan sampah pasar induk Cibitung, pihak pengelola masih belum memiliki SOP yang seharusnya menjadi suatu pedoman atau acuan dalam melakukan pekerjaan. Jika tidak ada SOP maka akan sulit melakukan pengawasan secara teknis. Namun untuk saat ini pengawasan penanganan dan pengelolaan sampah pada pasar induk cibitung dalam pelaksanaannya yang dijadikan acuan adalah kebiasaan-kebiasaan atau norma atau peraturan tidak tertulis. Jadi dapat disimpulkan untuk saat ini SOP pengawasan dalam penanganan dan pengelolaan sampah pada Pasar Induk Cibitung dalam pelaksanaannya yang dijadikan acuan adalah kebiasaan-kebiasaan atau norma atau peraturan tidak tertulis.

Peneliti melihat pengawasan khususnya dalam pengawasan sampah dan kebersihan lingkungan pasar yang dilakukan oleh Pengelola pasar dan UPTD pasar cibitung sebagai pihak pengelola lapangan dinilai belum efektif karena sampah masih sering terlihat di setiap kios/los pedagang, sampah tercecer di jalan akses keluar masuk pasar, serta bau sampah yang selalu tercium ketika memasuki pasar. Ini menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak efektif karena pengawasan yang dilakukan sama sekali tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap penanganan dan pengelolaan sampah Pasar Induk Cibitung.

Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah di Pasar Induk Cibitung maka pemerintah daerah melalui instansi terkait harus memiliki strategi yang responsif dan inovatif dalam mengatasi permasalahan sampah, karena jika sampah tidak dikelola dengan baik akan memberikan nilai efek bagi perekonomian pasar dan juga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada sebuah manajemen strategi dalam pengelolaan sampah yang di Pasar Induk Cibitung sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi sektor publik yang responsif dan inovatif. Menurut Hubertus Oja (2016) bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja organisasi pemerintah yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penerapan manajemen strategi bagi organisasi sektor publik menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja organisasi sektor publik. Hal tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk berpikir strategis, serta mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan pelaksanaan strateginya. Pegimplementasian manajemen strategi dalam organisasi sektor publik diharapkan dapat membantu organisasi tersebut dalam mewujudkan visi dan misinya.

KESIMPULAN

Kesimpulan akhir dari penelitian terkait Manajemen Pemerintah dalam Penanganan dan Pengelolaan Sampah adalah, penanganan dan pengelolaan sampah oleh pengelola pasar di Pasar Induk Cibitung masih dilakukan secara konvensional oleh pihak yaitu kumpul, angkut, buang. Penanganan dan pengelolaan masih dinilai kurang efektif, pengangkutan sampah yang dilakukan hanya dilakukan satu kali dalam satu hari sehingga menyebabkan sampah seringkali menumpuk di TPS, bahkan tercecer di sekitar lingkungan pasar, sehingga menimbulkan bau yang menyengat dan mengganggu aktifitas jual-beli.

Sebagai saran dari hasil penelitian ini, karena pengelolaan dan penanganan masih menggunakan metode konvensional, maka peneliti menyarankan agar pihak pengelola pasar menambah waktu pengangkutan sampah ke TPA dalam waktu satu hari. Dengan tujuan untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS, dan menghindari sampah yang sering tercecer, serta mengurangi bau yang menyengat di lingkungan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M.N., & Ali, M.M. 2003. Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Jurnal Teknik Pwk*, 2 (2).
- Andriani, Tiara. 2018. Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pasar Ciputat. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Defitri, Siska Yulia. 2011. Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Solok. *Jurnal Jurusan Akuntansi, UMMY*.
- Dicky Nurmayadi; Agi Rivi Hendaridi. Pengelolaan Sampah Dengan Pedekatan Behavior Mapping di Pasar Tradisional Kota Tasikmalaya. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2020.
- Eko Handoyo. 2012. Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima Pasca Relokasi. *Unnes Jurnal*.
- Ghony, M. Djunadi & Almashur, Fauzan. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Handayani, D Wahyu. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. *Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun*.
- Hantono, D., Batudoka, Z., Prakoso, A.A., dan Yuliasaksono, D. 2019. Adaptasi Seting Ruang Pasar Jiung Terhadap Kehadiran Pasar Temporer di Jalan Kemayoran Gempol Barat Jakarta. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 2.(2).
- Hasibuan, Malayu. 2011. MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hubertus Oja. Penerapan manajemen strategi dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*. Vol 6 Nomor 1 Tahun 2016
- Juliarta, I Made Guna. 2015. Analisis Efektifitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya terhadap Pengelola Pasar, Jumlah Pengunjung dan Pendapatan Pedagang Pasar (Studi Pasar Nyanggelan Desa Pekraman Panjer) *Jurnal Piramida*.

- Kadek Cyntia Pratiwi, I Nengah Kartika. 2019. Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Pedagang dan Pengelolaan Pasar Pohgading. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 8.7 (2019):805-834
- Muhlis Madani. Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas, Vol 1 No. 1 Tahun 2011.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Retribusi Daerah.